

Judul : 90 Persen PRT = Perempuan & Anak : Menteri Bintang Kawal RUU PPRT
Tanggal : Senin, 03 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

90 Persen PRT = Perempuan & Anak **Menteri Bintang Kawal RUU PPRT**

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan pengakuan terhadap PRT.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengungkapkan, mayoritas PRT adalah perempuan dan anak.

"(Sebanyak) 90 persen dari 4,2 juta PRT adalah perempuan dan anak. Untuk itu, penting untuk kita bisa mengawal pengesahan RUU PPRT dengan sebaik-baiknya," ujar Bintang dalam keterangan resminya, di Jakarta, kemarin.

Politisi PDI Perjuangan mengatakan, Pemerintah sepakat bahwa kerja yang dibutuhkan dalam penyusunan RUU PPRT tidak hanya kerja substansi, tapi kerja komunikasi dan politik juga menjadi penting.

Menurut Bintang, pentingnya sinkronisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara RUU PPRT dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Ketika bicara terkait perlindungan kepada PRT yang berasaskan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan hak asasi manusia, kami harapkan supaya memperhatikan UU yang ada terkait perempuan dan anak," tegasnya.

Ia juga menyambut baik langkah Kantor Staf Presiden yang memperpanjang tugas Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT.

Gugus tugas ini terdiri atas delapan kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemen PPPA, KSP, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.

"Praktik baiknya gugus ini sudah kita lihat bersama ketika mengawal pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, sejak awal kementerianannya sangat mendukung pengesahan RUU PPRT.

"Sebagai leading unit yang nanti akan mengawal RUU PPRT, kami sangat mendukung untuk segera kita tuntaskan RUU PPRT ini dalam waktu yang secepat-cepatnya," bebernya.

Anwar menilai, pentingnya sebuah profesi bagi pekerja, termasuk PRT sehingga berharap perlindungan yang komprehensif kepada mereka dapat terwujud.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui tengah mempersiapkan Surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penunjukkan wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU PPRT.

"Sambil menunggu Surat Presiden diterbitkan, kita bekerja secara simultan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), mempersiapkan konsinyering, serta melakukan komunikasi publik dan politik," ungkapnya. ■ **KPJ**